

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resepsi pengguna media sosial YouTube terhadap wacana kontroversi RUU TNI, yang mengukur bagaimana audiens digital merespons dan memaknai isu tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa resepsi publik terhadap wacana RUU TNI di YouTube bersifat majemuk dan bervariasi, di mana pengguna media digital mengadopsi posisi pembacaan yang beragam sesuai dengan model *encoding/decoding* Stuart Hall. Resepsi oposisi dan negosiasi yang kritis sebagian besar ditunjukkan oleh informan yang memiliki latar belakang profesional (akademisi, jurnalis, dan aktivis), yang menafsirkan revisi sebagai ancaman potensial terhadap supremasi sipil dan demokrasi, dengan menyoroti masalah transparansi dan perluasan kewenangan militer. Di sisi lain, ditemukan pula resepsi yang cenderung akomodatif (hegemonik atau negosiasi ringan), di mana pengguna memaknai revisi sebagai langkah adaptif yang wajar untuk menyesuaikan peran TNI dengan tantangan non-konvensional yang semakin kompleks. Selain itu, konten YouTube, khususnya yang berformat *podcast* atau opini, diakui oleh informan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pemaknaan serta memicu penggiringan opini publik (*opinion-guiding*), yang menuntut tingkat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis yang tinggi dari audiens.

Keragaman resepsi pengguna YouTube ini merefleksikan bahwa isu RUU TNI jauh melampaui persoalan teknis hukum, melainkan merupakan arena kontestasi ideologi dan makna yang bersinggungan langsung dengan semangat Reformasi serta konsolidasi demokrasi sipil di Indonesia. Oleh sebab itu, temuan ini menggarisbawahi urgensi literasi media dan pemikiran kritis sebagai modal sosial bagi publik digital dalam menyaring konten visual politik yang sarat muatan ideologis, agar partisipasi digital tidak sekadar menjadi ekspresi sentimen yang terpolarisasi. Analisis resepsi dalam penelitian ini menegaskan kembali bahwa audiens media digital bukanlah penerima pasif, melainkan subjek aktif yang

memaknai ulang narasi yang beredar, sehingga setiap kebijakan strategis yang menyentuh ranah sipil-militer akan selalu menjadi medan tafsir yang kompleks dalam ruang publik digital.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan model resepsi Stuart Hall dengan pendekatan *big data* dan analisis jaringan media sosial. Keterbatasan penelitian kualitatif ini dalam menangkap skala perbedaan serta polarisasi opini secara masif di YouTube dapat diatasi dengan menggunakan analisis sentimen komputasional terhadap volume besar komentar dan *likes*. Hal tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai sebaran posisi resepsi (hegemonik, negosiasi, dan oposisi) dalam ekosistem digital yang luas.

Disarankan agar penelitian berikutnya tidak hanya berfokus pada isu RUU TNI, tetapi juga membandingkan resepsi pengguna terhadap isu-isu sipil-militer lainnya (seperti peran TNI dalam penanganan bencana, dwifungsi non-formal, atau isu Alutsista). Selain itu, penting untuk membandingkan temuan resepsi di YouTube dengan platform media sosial lain seperti X (Twitter) atau TikTok yang memiliki karakteristik audiens dan algoritma penyebaran konten yang berbeda untuk memetakan dinamika diskursus secara lebih komprehensif.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Bagi pemerintah atau DPR sebagai pembuat kebijakan, dalam proses legislasi yang kontroversial, khususnya yang menyangkut isu fundamental seperti relasi sipil dengan militer, disarankan agar proses *encoding* pesan (penyampaian tujuan revisi undang-undang) dilakukan secara lebih terbuka, inklusif, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh publik. Pemanfaatan platform digital seperti YouTube harus diimbangi dengan sesi tanya jawab langsung dan dialog antara berbagai pihak yang melibatkan akademisi, *civil society*, dan masyarakat umum,

bukan sekadar sosialisasi satu arah. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait (TNI) perlu membangun mekanisme pemantauan serta klarifikasi yang cepat dan kredibel untuk merespons narasi oposisi atau informasi yang menyesatkan di media digital.

Bagi lembaga pers, media massa, dan *content creator* YouTube, disarankan untuk menjaga independensi dan menyediakan analisis yang lebih mendalam, berimbang, dan tidak bersifat menggiring opini (*opinion-guiding*) secara sepihak. Konten yang dihasilkan harus memuat berbagai sudut pandang (termasuk sudut pandang oposisi yang kritis) serta menekankan pada pemeriksaan fakta yang akurat. Selain itu, para *content creator* populer, khususnya yang membahas isu politik dan hukum, dapat berkolaborasi dengan ahli literasi digital untuk menyisipkan pesan edukatif kepada audiens mengenai pentingnya berpikir kritis, mengenali bias naratif, serta memverifikasi sumber informasi.

Bagi masyarakat, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa konten YouTube merupakan hasil dari proses *encoding* yang sarat dengan pemaknaan dan kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, pengguna harus mengaktifkan posisi resepsi oposisi atau negosiasi (membaca kritis) secara sadar, tidak menerima pesan secara hegemonik, serta aktif mencari informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk membentuk pemaknaan yang lebih utuh dan tidak terpolarisasi. Selain itu, pengguna media sosial perlu didorong untuk menggunakan kolom komentar sebagai ruang diskusi yang konstruktif dan argumentatif, serta menjauhi ujaran kebencian, *ad hominem*, atau penyebaran disinformasi yang merusak kualitas ruang publik digital.